

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam industri baterai kendaraan listrik serta dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan rantai pasok energi global. Melalui pendekatan ekonomi politik internasional dan teori neo-merkantilisme, penelitian ini menemukan bahwa rivalitas dua kekuatan besar ini tidak hanya bersifat teknologis dan ekonomi, tetapi juga berimplikasi luas terhadap tatanan energi global yang sedang bertransisi menuju sistem rendah karbon. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada Bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

Industri baterai kendaraan listrik telah menjadi sektor strategis dalam peta energi global karena posisinya sebagai teknologi inti dalam elektrifikasi transportasi dan penyimpanan energi terbarukan. Dominasi Tiongkok atas lebih dari 70% kapasitas pemrosesan mineral penting seperti litium, kobalt, dan grafit, serta kekuatan manufakturnya melalui perusahaan seperti CATL dan BYD, menjadikan negara ini aktor utama dalam rantai pasok global baterai. Di sisi lain, Amerika Serikat, melalui kebijakan *Inflation Reduction Act (IRA)* dan aliansi seperti *Mineral Security Partnership*, berupaya mengejar ketertinggalan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari Tiongkok.

Persaingan ini menunjukkan manifestasi dari logika neo-merkantilisme, di mana negara memegang peranan utama dalam mengamankan sektor-sektor strategis melalui kebijakan proteksionis, intervensi industri, dan diplomasi ekonomi. Baik AS maupun Tiongkok memanfaatkan kebijakan negara untuk memperluas pengaruh ekonomi sekaligus memperkuat daya tawar politik mereka di tatanan global.

Rivalitas AS–Tiongkok dalam industri baterai juga memicu fragmentasi rantai pasok global. Ketegangan geopolitik, pembatasan ekspor bahan baku strategis, serta upaya reshoring dan friend-shoring telah menyebabkan dislokasi pasokan global. Negara-negara sekutu AS berupaya mengurangi ketergantungan pada

pasokan Tiongkok, sementara Tiongkok memperkuat dominasi pasokannya melalui investasi dan kontrol di negara-negara Global South, khususnya dalam kerangka *Belt and Road Initiative (BRI)*. Hal ini berdampak pada:

- **Gangguan pasokan** bahan baku di pasar global, terutama bagi negara non-produsen;
- **Kenaikan harga** logam kritis akibat kekhawatiran terhadap geopolitik pasokan;
- **Kelangkaan bahan baku** di negara industri seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa;
- **Munculnya blok dagang baru** berdasarkan afiliasi politik dan ekonomi.

Fragmentasi ini menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi transisi energi global karena stabilitas pasokan menjadi bergantung pada dinamika politik antara dua negara adidaya.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah munculnya bentuk baru dari ketergantungan global, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menjadi lokasi utama pertambangan logam kritis. Negara seperti Republik Demokratik Kongo (kobalt), Indonesia (nikel), dan negara-negara di kawasan Lithium Triangle menjadi sumber utama bahan mentah, namun tetap berada di posisi bawah dalam rantai nilai global.

Dominasi perusahaan-perusahaan Tiongkok di sektor hulu, seperti CMOC dan Huayou Cobalt di Afrika, menandakan bahwa kontrol atas sumber daya di negara berkembang telah berpindah tangan ke aktor negara asing melalui diplomasi investasi dan model ekstraksi eksploitatif. Ketergantungan ini melahirkan ancaman *over-dependence* dan dilema kebijakan domestik, di mana negara berkembang dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga investasi asing sambil tetap mempertahankan kedaulatan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun menciptakan risiko fragmentasi dan ketergantungan baru, persaingan AS–Tiongkok juga membuka peluang dalam geopolitik energi global. Beberapa peluang utama yang diidentifikasi adalah:

- **Diversifikasi rantai pasok** sebagai strategi mengurangi konsentrasi pasokan, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Negara-negara seperti Indonesia, Argentina, dan Afrika Selatan dapat memanfaatkan posisi mereka untuk membentuk posisi tawar baru dalam rantai nilai global;
- **Meningkatnya peran negara berkembang** dalam diplomasi energi, baik melalui hilirisasi, pembentukan koalisi regional, maupun perjanjian bilateral dengan kekuatan besar;
- **Akselerasi inovasi teknologi**, baik di bidang baterai generasi baru (solid-state, sodium-ion) maupun teknologi daur ulang dan efisiensi energi;
- **Meningkatnya arus investasi hijau**, termasuk proyek infrastruktur energi bersih dan teknologi manufaktur ramah lingkungan yang didorong oleh kompetisi global.

Peluang-peluang ini menuntut negara berkembang untuk memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat, strategi industri yang terarah, dan kemampuan negosiasi yang adil agar tidak kembali terjebak dalam siklus eksploitasi.

Persaingan AS–Tiongkok dalam industri baterai merupakan bagian dari transisi besar dalam geopolitik energi global. Di masa lalu, kontrol terhadap minyak dan gas merupakan pilar utama kekuasaan energi. Saat ini, kekuasaan tersebut perlahan bergeser ke arah kontrol atas mineral strategis dan teknologi penyimpanan energi. Dalam konteks ini, negara yang mampu menguasai rantai pasok baterai memiliki posisi strategis dalam membentuk arsitektur energi dunia di masa depan.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional, dapat disimpulkan bahwa kontestasi ini bukan semata soal efisiensi pasar atau kompetisi dagang, melainkan bagian dari perebutan hegemoni global dalam era energi baru. Negara-negara besar menggunakan kekuatan negara untuk menciptakan ekosistem teknologi yang mendukung agenda geoekonominya, sementara negara-negara

kecil dan berkembang dipaksa untuk menavigasi kondisi sistemik yang semakin kompleks dan asimetris.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, baik dalam konteks praktis bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan isu rantai pasok baterai kendaraan listrik, maupun dalam konteks akademik untuk pengembangan penelitian lanjutan.

a) Bagi Pemerintah Negara Berkembang

- Pemerintah negara berkembang yang memiliki cadangan logam kritis diharapkan dapat: Memperkuat kebijakan hilirisasi industri agar tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari proses pemurnian dan manufaktur.
- Memastikan tata kelola pertambangan yang transparan dan berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat lokal, tenaga kerja, dan lingkungan hidup.
- Memperluas kerja sama internasional yang berbasis pada prinsip kesetaraan, terutama dengan negara-negara *Global South* lainnya, untuk memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok energi baru.

b) Bagi Perusahaan Multinasional dan Industri Baterai

- Menjalankan prinsip *due diligence* dalam seluruh rantai nilai, khususnya di negara berkembang, dengan memastikan bahwa rantai pasok bebas dari praktik kerja paksa, perusakan lingkungan, atau pelanggaran hak asasi manusia.
- Berinvestasi dalam transfer teknologi dan peningkatan kapasitas lokal, agar negara pemasok tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memiliki kemampuan produksi dan inovasi.
- Menyesuaikan strategi rantai pasok dengan dinamika geopolitik, termasuk menjajaki sumber bahan baku alternatif, teknologi daur ulang, dan inovasi berbasis keberlanjutan.

c) Bagi Lembaga Internasional dan Organisasi Regional

- Mendorong pembentukan standar global untuk rantai pasok mineral strategis, yang mencakup aspek keberlanjutan, transparansi, dan keadilan.
- Memfasilitasi platform dialog antara negara penghasil dan negara pengguna, untuk menciptakan kesepakatan perdagangan yang tidak eksploitatif.
- Memberikan dukungan teknis dan finansial bagi negara berkembang agar dapat mengembangkan infrastruktur energi bersih dan kapasitas hilirisasi industri.

d) Bagi Masyarakat Umum dan Konsumen

- Meningkatkan kesadaran akan jejak rantai pasok dalam konsumsi kendaraan listrik, serta mendorong permintaan terhadap produk yang diproduksi secara etis dan ramah lingkungan.
- Mendukung kebijakan nasional yang pro terhadap transisi energi berkeadilan, termasuk melalui partisipasi dalam diskusi publik dan advokasi kebijakan.
- Memanfaatkan peluang ekonomi baru yang muncul dari revolusi teknologi energi, seperti lapangan kerja di sektor manufaktur hijau, daur ulang baterai, dan layanan energi bersih.